



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA
PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam berinvestasi serta perizinan pemanfaatan ruang perlu ketersediaan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi yang selaras dengan rencana pembangunan nasional dan pemanfaatan ruang eksisting;
 - b. bahwa untuk mendorong penggunaan informasi geospasial hasil percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta, memperluas cakupan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta khususnya peta bidang perekonomian, peta bidang kemaritiman, peta bidang kebencanaan, dan peta lainnya serta mengakomodasi perubahan tugas dan fungsi organisasi kementerian dan lembaga, perlu dilakukan perubahan atas cakupan kegiatan dan rencana aksi kebijakan satu peta dan perubahan struktur kelembagaan tim percepatan kebijakan satu peta dan tim pelaksana kebijakan satu peta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000;
 - d. bahwa ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Satu Peta yang selanjutnya disingkat KSP adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.

2. Peta . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

2. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di bawah, pada permukaan, atau di atas yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
3. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
4. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
5. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
6. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
7. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
8. IGT Status adalah IGT yang mempunyai aspek hukum dalam penguasaan dan/atau pemanfaatan ruang.
9. IGT Perencanaan Ruang adalah IGT yang memuat aspek perencanaan pemanfaatan ruang.
10. IGT Potensi adalah IGT yang memuat informasi mengenai transportasi dan logistik, sumber daya dan lingkungan, serta fasos fasum dan utilitas.

11. Walidata . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

11. Walidata IGT adalah kementerian/lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan IGT tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Kelompok Kerja Nasional IGT adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk mengelola penyelenggaraan IGT antar pemangku kepentingan.
13. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
14. Kementerian/Lembaga adalah kementerian/ lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan kementerian/lembaga terkait lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan sinkronisasi.
15. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Kompilasi adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data IGT yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan/atau Pemda untuk seluruh wilayah Indonesia.
17. Integrasi adalah rangkaian kegiatan dalam melakukan koreksi dan verifikasi data IGT terhadap IGD.
18. Sinkronisasi adalah rangkaian kegiatan penyelarasan IGT yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan/atau Pemda.

19. Ketelitian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

19. Ketelitian Peta adalah ketepatan, kerincian dan kelengkapan data, dan/atau informasi georeferensi dan tematik, sehingga merupakan penggabungan dari sistem referensi geometris, skala, akurasi, atau kerincian basis data, format penyimpanan secara digital termasuk kode unsur, penyajian kartografis mencakup simbol, warna arsiran dan notasi, serta kelengkapan muatan peta.
 20. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu IG dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
 21. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
 22. Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP adalah langkah-langkah perbaikan IGT yang terdapat di berbagai Kementerian/Lembaga melalui proses Kompilasi data IGT yang ada, Integrasi data IGT dengan data IGD, dan Sinkronisasi antar data IGT.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Percepatan pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.
- (2) Satu peta hasil percepatan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai acuan:

a. kebijakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- a. kebijakan pembangunan berbasis spasial;
 - b. perencanaan dan pemanfaatan ruang yang terintegrasi dalam rencana tata ruang di darat, laut, dalam bumi, dan udara;
 - c. kesesuaian dan perizinan pemanfaatan ruang masing-masing sektor;
 - d. penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang; dan
 - e. perbaikan data IGT masing-masing sektor.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Percepatan pelaksanaan KSP dilakukan melalui penetapan Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
 - (2) Penanggung jawab program pada Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan ketersediaan pendanaan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan/atau Pemda untuk penyiapan IGD dan/atau IGT.
 - (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Percepatan pelaksanaan KSP dilakukan pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.
- (2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (2) Dalam hal tertentu, percepatan pelaksanaan KSP dapat dilakukan pada tingkat Ketelitian Peta selain Peta Skala 1:50.000 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Percepatan pelaksanaan KSP terdiri dari 4 (empat) tahapan kegiatan, yang terdiri atas:
 - a. Kompilasi;
 - b. Integrasi;
 - c. Sinkronisasi; dan
 - d. berbagi data dan IG melalui JIGN.
 - (4) Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan percepatan perwujudan IGD skala 1:50.000 sampai dengan skala 1:5.000 dan peta batas wilayah administrasi provinsi, kabupaten/kota, desa, kelurahan, dan peta batas wilayah administrasi pengelolaan sumber daya laut provinsi.
5. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Percepatan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Satu Data Indonesia.
- (2) Satu peta hasil percepatan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk selanjutnya diintegrasikan dalam Satu Data Indonesia.
- (3) Tata kelola dan/atau pemanfaatan data satu peta yang telah diintegrasikan dalam Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Satu Data Indonesia.

(4) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (4) Dalam hal satu peta hasil percepatan pelaksanaan KSP belum diintegrasikan dalam Satu Data Indonesia, tata kelola dan/atau pemanfaatan data dalam setiap tahapan kegiatan percepatan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden ini.
6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP, Pemerintah membentuk Tim Percepatan KSP.
- (2) Tim Percepatan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk:
- a. memberikan arahan strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP;
 - b. memberikan arahan kebijakan strategis untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan KSP;
 - c. memberikan arahan strategis terhadap hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSP; dan
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan KSP.
- (3) Dalam hal tertentu, Tim Percepatan KSP dapat mengubah Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah mendapat persetujuan Presiden.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Percepatan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Anggota :
 1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Keuangan;
 3. Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 7. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 8. Menteri Pertanian;
 9. Menteri Perindustrian;
 10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 11. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 12. Sekretaris Kabinet;
 13. Kepala Staf Kepresidenan;
 14. Kepala Badan Informasi Geospasial;
 15. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- (5) Tim Percepatan KSP dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim Pelaksana KSP dan Sekretariat KSP.
7. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan arahan Tim Percepatan KSP dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP;
 - b. menetapkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- b. menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan teknis percepatan pelaksanaan KSP;
 - c. menetapkan langkah-langkah dan kegiatan prioritas bagi Kelompok Kerja Nasional IGT dan Walidata IGT;
 - d. melaksanakan arahan kebijakan strategis dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan percepatan pelaksanaan KSP;
 - e. menyusun mekanisme berbagi data dan IG melalui JIGN; dan
 - f. melaksanakan arahan strategis terhadap hasil pemantauan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan KSP.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Kepala Badan Informasi Geospasial;
 - b. Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. Wakil Ketua II : Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 - d. Wakil Ketua III : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet;
 - e. Anggota : 1. Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis, Kantor Staf Presiden;
2. Direktur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
5. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Badan Informasi Geospasial;
8. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial;
9. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial;
10. Direktur . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

10. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 11. Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
 12. Deputi Bidang Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- (3) Tim Pelaksana KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berkedudukan di Badan Informasi Geospasial.
8. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sekretariat KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) mempunyai tugas memberikan dukungan dan fasilitasi teknis operasional dan administratif kepada Tim Percepatan KSP dan Tim Pelaksana KSP.
- (2) Sekretariat KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretaris : Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Wakil Sekretaris : Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
 - c. Satuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- c. Satuan Tugas 1;
 - d. Satuan Tugas 2; dan
 - e. Satuan Tugas 3.
- (3) Sekretariat KSP secara administratif berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (4) Satuan Tugas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi dan kompilasi basis data IGT nasional yang bersumber dari Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan Pemda;
 - b. melakukan Kompilasi dan pengelompokan IGT ke dalam kelompok data IGT Status, IGT Perencanaan Ruang, dan IGT Potensi;
 - c. melakukan Integrasi bersama Walidata IGT sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh Badan Informasi Geospasial;
 - d. mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan rencana aksi antara Tim Percepatan KSP dengan Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan Pemda terutama dalam kegiatan Kompilasi dan Integrasi IGT; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi data IGT hasil Kompilasi dan Integrasi.
- (5) Satuan Tugas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mempunyai tugas:
- a. melakukan penyelarasan antar data IGT di kelompok data IGT Status, IGT Perencanaan Ruang, dan IGT Potensi;
 - b. melakukan penyelarasan antar kelompok data IGT sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. melakukan proses tumpang susun antar IGT sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menghasilkan Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT;
 - d. merumuskan rekomendasi penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang;
 - e. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- e. melakukan fasilitasi rencana aksi penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelerasan, proses tumpang susun, perumusan rekomendasi dan pelaksanaan rencana aksi.
- (6) Satuan Tugas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mempunyai tugas:
- a. menguatkan JIGN untuk berbagi data dan IG hasil percepatan pelaksanaan KSP dalam bentuk portal KSP;
 - b. meningkatkan kemudahan dan kecepatan akses portal KSP;
 - c. memastikan kualitas penyimpanan dan pengamanan data dan IG hasil percepatan pelaksanaan KSP sesuai dengan standar yang berlaku;
 - d. memastikan kualitas data hasil percepatan KSP sesuai dengan standar data spasial tematik yang berlaku secara nasional;
 - e. membangun dan mengembangkan sistem pemuktahiran data dan IG secara sentralisasi dan/atau disentralisasi (*hybrid*) dalam sistem pengelolaan berbasis data;
 - f. melaksanakan pembinaan, asistensi dan konsultasi dalam rangka pemanfaatan data dan penggunaan portal KSP;
 - g. mengintegrasikan portal KSP dan/atau JIGN dalam portal Satu Data Indonesia;
 - h. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam rangka pembangunan dan penguatan kelembagaan JIGN.
- (7) Keanggotaan Satuan Tugas 1, Satuan Tugas 2, dan Satuan Tugas 3, ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretaris Tim Percepatan KSP.

(8) Sekretariat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- (8) Sekretariat KSP dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.
9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Peraturan Presiden ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Informasi Geospasial sesuai dengan pembagian bidang tugas untuk kegiatan Tim Percepatan KSP dan Sekretariat KSP;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Badan Informasi Geospasial untuk kegiatan Tim Pelaksana KSP dan Kelompok Kerja Nasional IGT;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada masing-masing Kementerian/Lembaga untuk kegiatan Walidata IGT;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mendukung kegiatan KSP.
10. Lampiran Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ditandatangani oleh Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA
TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000

RENCANA AKSI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
A. PENETAPAN MEKANISME DAN TATA KERJA PELAKSANAAN PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA						
1.	Penetapan Walidata IGT	Penetapan Walidata IGT pada Kementerian/ Lembaga	Keputusan Penetapan Walidata IGT	Bulan Maret (B03) 2021	Badan Informasi Geospasial (BIG)	Kementerian dan Lembaga terkait

2. Penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
2.	Penetapan Kelompok Kerja Nasional (POKJA) IGT	Penetapan POKJA IGT	Keputusan Penetapan POKJA IGT	Bulan Maret (B03) 2021	BIG	Kementerian dan Lembaga terkait
3.	Penetapan Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP)	Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat Tim PKSP	Peraturan mengenai Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat Tim PKSP	Bulan Maret (B03) 2021	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian)	1. Sekretariat Kabinet (Setkab); 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves); 3. Kantor Staf Presiden;

4. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); 5. BIG.
4.	Penetapan Mekanisme dan Tata Kerja Pembuatan IGT	Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja pembuatan IGT	Mekanisme dan Tata Kerja pembuatan IGT	Bulan Maret (B03) 2021	Walidata IGT	BIG

5. Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
5.	Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Kegiatan Kompilasi dan Integrasi Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Kegiatan Kompilasi dan Integrasi Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	Peraturan Kepala BIG tentang Mekanisme dan Tata Kerja Kegiatan Kompilasi dan Integrasi Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	Bulan Maret (B03) 2021	BIG	Kementerian dan Lembaga terkait
6.	Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Peta Batas Kecamatan dan Kelurahan.	Menyusun Mekanisme dan Tata Kerja Peta Batas Kecamatan dan Kelurahan	Peraturan Menteri Dalam Negeri	Bulan Maret (B03) 2021	Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	Kementerian dan Lembaga terkait

7. Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
7.	Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Berbagi Pakai Data dan IG Kebijakan Satu Peta	Menyusun Mekanisme dan Tata Kerja Berbagi Pakai Data dan IG Kebijakan Satu Peta	Peraturan Kepala BIG tentang Mekanisme Tata Kerja dan Berbagi Pakai Data dan IG Kebijakan Satu Peta	Bulan Maret (B03) 2021	BIG	Kementerian dan Lembaga terkait
B. PERWUJUDAN IGD						
1.	Perwujudan Peta Dasar	Mewujudkan tersedianya Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI)	Peta RBI skala 1:5.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2024	BIG	1.Kemenko Perekonomian; 2.Kementerian PPN/ Bappenas;

Peta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			Peta RBI skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Maret (B03) 2021 dengan dukungan Peta Laut Indonesia	BIG	3. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN); 4. Pusat Hidrologi dan Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Pushidrosal TNI – AL).
			Peta RBI skala 1:250.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Oktober (B10) 2022, dengan dukungan Peta Laut Indonesia	BIG	

Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		Penyediaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Wilayah Indonesia (CSRST)	Tersedianya Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Optis Resolusi minimal 50 cm	Seluruh wilayah Indonesia yang belum tersedia CSRST Bulan Maret (B03) 2021 Pemutakhiran CSRST wilayah Indonesia, setiap tahun.	LAPAN	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK); 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN); 5. BIG; 6. Kementerian Pertahanan (Kemenhan);

7. Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						7. Pemerintah Provinsi (Pemprov); 8. Pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/kota).
		Penyediaan Foto Udara Resolusi Tinggi Wilayah Pulau Terluar	Tersedianya Foto Udara Resolusi Tinggi	Wilayah pulau terluar, Bulan Oktober (B10) 2022	Kemenhan	1. Kemenko Perekonomian; 2. BIG; 3. LAPAN; 4. Kemendagri; 5. Kementerian ATR/BPN; 6. Tentara Nasional Indonesia (TNI).
		Penyediaan Data Penginderaan Jauh	Tersedianya Data Penginderaan Jauh untuk Mendukung Penyediaan Peta RBI Skala 1:5.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2023	1. BIG; 2. LAPAN.	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kemenhan.

C. PEMUTAKHIRAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
C. PEMUTAKHIRAN IGD						
1.	Pemutakhiran Peta Dasar	Memutakhirkan Peta RBI	Peta RBI skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2024	BIG	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian PPN/ Bappenas; 3. LAPAN.
D. PERWUJUDAN IGT						
D.1 Perwujudan IGT Status						
1.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Perizinan Lokasi	Peta Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum Skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Juni (B06) 2021.	Kementerian ATR/BPN	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian Keuangan (Kemenkeu); 3. Kemendagri;

2. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		4. Kementerian Pertanian (Kementan); 5. Kementerian Perindustrian (Kemenperin); 6. Kementerian LHK; 7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM); 8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); 9. Kementerian Perhubungan (Kemenhub); 10. BIG;

11 Pemprov; . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						11. Pemprov; 12. Pemkab/kota.
2.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Pertanahan	Peta Zona Nilai Tanah minimal skala 1:10.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Juni (B06) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ATR/BPN	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenkeu; 3. Kemendagri; 4. Kementan; 5. Kemenperin; 6. Kementerian LHK; 7. Kementerian ESDM; 8. Kementerian PUPR; 9. Kemenhub; 10. BIG; 11. Pemprov; 12. Pemkab/kota.

3. Perwujudan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
3.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Pertanahan	Peta Penggunaan dan Kepemilikan Tanah (Hak Milik) Skala 1:5.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Juni (B06) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ATR/BPN	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementan; 3. Kementerian BUMN; 4. Kementerian LHK; 5. Kementerian ESDM; 6. Kementerian PUPR; 7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT); 8. BIG; 9. Pemprov; 10. Pemkab/kota.

4. Perwujudan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
4.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Pertanahan	Peta Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Milik BUMN minimal skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Juni (B06) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian BUMN	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenkeu; 3. Kemendagri; 4. Kementan; 5. Kemenperin; 6. Kementerian LHK; 7. Kementerian ESDM; 8. Kementerian PUPR; 9. Kemenhub; 10. BIG; 11. Pemprov; 12. Pemkab/kota.

5. Perwujudan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
5.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Batas Wilayah	Peta Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi Skala 1:250.000 - 1:25.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Bulan September (B09) 2021 tersedia peta kerja indikatif Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran setiap Bulan Juni (B06) dan Bulan Desember (B12).	Kemendagri	1. Setkab; 2. Kemenko Perekonomian; 3. Kemenko Marves; 4. Kementerian PPN/Bappenas; 5. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu); 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP); 7. BIG; 8. LAPAN; 9. Pusidrosal TNI - AL; 10. Direktorat Topografi TNI-AD; 11. Pemprov.

6. Perwujudan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
6.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Migas dan Minerba	Peta Wilayah Kerja dan Wilayah Penugasan Panas Bumi Indonesia skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Maret (B03) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Maret (B03), Bulan Juni (B06), Bulan September (B09) dan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ESDM	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves; 3. Kemendagri; 4. Kementerian LHK; 5. Kementerian ATR/BPN; 6. Kementerian PUPR; 7. BIG; 8. Pemprov; 9. Pemkab/kota.

7. Perwujudan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
7.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Perizinan Lokasi dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	Peta Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.	Kementerian KP	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves; 3. Kementerian PPN/Bappenas; 4. Kemendagri; 5. Kemenlu; 6. Kementerian ATR/BPN;

2. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		7. Kemenhan; 8. Kementerian ESDM; 9. Kemenhub; 10. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf); 11. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo); 12. Kementerian LHK; 13. Setkab; 14. BIG; 15. Pushidrosal TNI – AL.

8. Perwujudan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
8.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Perizinan Lokasi di Laut dan Perizinan Berusaha terkait Kegiatan Pemanfaatan di Laut	Peta Izin Lokasi di Laut dan Peta Perizinan Berusaha terkait Kegiatan Pemanfaatan di Laut Skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian KP	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves; 3. Kementerian PPN/Bappenas; 4. Kemendagri; 5. Kemenlu; 6. Kementerian ATR/BPN; 7. Kemenhan; 8. Kementerian ESDM; 9. Kemenhub; 10. Kemenparekraf; 11. Kemenkominfo; 12. Kementerian LHK; 13. Setkab; 14. BIG; 15. Pushidrosal TNI – AL.

9. Perwujudan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
9.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Wilayah Adat	Peta Wilayah Adat di Perairan Laut Skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Juni (B06) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian KP	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves; 3. Kementerian PPN/Bappenas; 4. Kemendagri; 5. Kementerian ATR/BPN; 6. Kemenhan; 7. Kementerian ESDM; 8. Kemenhub; 9. Kemenparekraf; 10. Kemenkominfo; 11. Kementerian LHK; 12. Setkab; 13. BIG; 14. Pushidrosal TNI – AL.

10. Perwujudan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
10.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Kawasan Khusus	Peta Kawasan Berikat dan Kawasan Lainnya Di bawah Pengawasan Pabean Skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kemenkeu	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemendagri; 3. Kemendag; 4. Kemenperin; 5. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM); 6. BIG; 7. Pemprov; 8. Pemkab/kota.
11.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Pertanahan	Peta Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Milik Negara (BMN) minimal skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021;	Kemenkeu	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenkeu; 3. Kemendagri; 4. Kementerian BUMN;

b. Integrasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				b. Integrasi Bulan Juni (B06) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		5. Kementan; 6. Kemenperin; 7. Kementerian LHK; 8. Kementerian ESDM; 9. Kementerian PUPR; 10. Kemenhub; 11. BIG; 12. Pemprov; 13. Pemkab/kota.
12.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Kehutanan	Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021;	Kementerian LHK	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves; 3. Kemendagri; 4. Kementerian ATR/BPN; 5. Kementerian ESDM;

b. Integrasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				b. Integrasi Bulan Maret (B03) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		6. Kemendes PDTT; 7. Kementan; 8. Kementerian PUPR; 9. Kemenhan; 10. BIG; 11. LAPAN.
13.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Kehutanan	Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru skala 1:250.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Maret (B03) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Juni (B06) dan Bulan Desember (B12).	Kementerian LHK	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves; 3. Kemendagri; 4. Kementerian ATR/BPN; 5. Kementerian ESDM; 6. Kemendes PDTT; 7. Kementan; 8. Kementerian PUPR; 9. BIG.

14. Perwujudan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
14.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Kehutanan	Peta Pelepasan Kawasan Hutan skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Maret (B03) 2021 Integrasi. 2. Pemutakhiran Bulan Juni (B06) dan Bulan Desember (B12).	Kementerian LHK	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kementerian ESDM; 5. Kementerian PUPR; 6. Kementan; 7. BIG; 8. LAPAN;
15.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Kehutanan	Peta Tata Batas Area Kerja Izin Pemanfaatan Hutan (IUPHHK- HA/HT/RE) skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:	Kementerian LHK	1. Kemenko Marves; 2. Kemenko Perekonomian; 3. Kementerian ATR/BPN;

a. Kompilasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Maret (B03) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Juni (B06) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun.		4. Kementerian ESDM; 5. Kemendes PDTT; 6. Kemenfan; 7. Kementerian PUPR; 8. BIG; 9. LAPAN.
16.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Kehutanan	Peta Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan Skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.	Kementerian LHK	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves; 3. Kemendagri; 4. Kementerian ATR/BPN; 5. Kementan;

2. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2. Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun.		6. Kemendes PDTT; 7. Kementerian ESDM; 8. BIG; 9. Pemprov; 10. Pemkab/kota.
17.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Kehutanan	Peta Hak Pengelolaan Hutan Desa Skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun.	Kementerian LHK	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves; 3. Kemendagri; 4. Kementerian ATR/BPN; 5. Kementan; 6. Kemendes PDTT; 7. Kementerian ESDM; 8. BIG; 9. Pemprov; 10. Pemkab/kota.

18. Perwujudan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
18.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Kehutanan	Peta Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial Skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun.	Kementerian LHK	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves; 3. Kemendagri; 4. Kementerian ATR/BPN; 5. Kementan; 6. Kemendes PDTT; 7. Kementerian ESDM; 8. BIG; 9. Pemprov; 10. Pemkab/kota.
19.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021;	Kementerian LHK	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemendagri 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kementan;

b. Integrasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				b. Integrasi Bulan Maret (B03) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Juni (B06) dan Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru.		5. BIG; 6. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
20.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Kesatuan Hidrologis Gambut skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia. a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Maret (B03) 2021.	Kementerian LHK	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves; 3. Kemendagri; 4. Kementerian ATR/BPN; 5. Kementan; 6. BIG; 7. BRGM.

2. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2. Pemutakhiran Bulan Juni (B06) dan Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/penetapan baru.		
21.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Perizinan Berusaha di Bidang Perkebunan	Peta Perizinan Berusaha di Bidang Perkebunan skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia a. Kompilasi Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Maret (B03) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementan	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves; 3. Kemendagri; 4. Kementerian LHK; 5. Kementerian ATR/BPN; 6. BIG; 7. LAPAN; 8. Pemprov; 9. Pemkab/kota.

22. Perwujudan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
22.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Kawasan Khusus	Peta Sebaran Kegiatan Industri skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Maret (B03) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kemenperin	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian LHK; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kemendag; 5. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); 6. Pemprov; 7. Pemkab/kota.
23.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Kawasan Khusus	Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021;	Kemenhub	1. Kemenko Marves; 2. Kemenko Perekonomian; 3. Kementerian KP; 4. Kementerian LHK;

b. Integrasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				b. Integrasi Bulan Juni (B06) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		5. Kementerian ESDM; 6. BIG; 7. Pemprov; 8. Pemkab/kota.
24.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Kawasan Khusus	Peta Kawasan Keamanan Operasional Penerbangan (KKOP) skala 1:5.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Juni (B06) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kemenhub	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian BUMN; 3. Kemendagri;

25. Perwujudan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
25.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Kawasan Khusus	Peta Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Maret (B03) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kemenperin	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemendagri; 3. Kementerian LHK; 4. Kementerian ATR/BPN; 5. Kementerian PUPR; 6. Kementerian Perdagangan (Kemendag); 7. Kementerian ESDM; 8. BIG; 9. BKPM; 10. Pemprov; 11. Pemkab/kota.

26. Perwujudan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
26.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Proyek Strategis	Peta Proyek Strategis Nasional (PSN) skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kemenko Perekonomian	1. Kemenko Marves; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kemendagri; 4. Kementerian PUPR; 5. Kemenhub; 6. Kementerian ESDM; 7. Kemenperin; 8. Kemenkominfo; 9. Kementerian KP; 10. Kementerian BUMN; 11. Kementerian ATR/BPN; 12. Kementerian LHK; 13. Pemprov; 14. Pemkab/kota.

D.2 Perwujudan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
D.2 Perwujudan IGT Perencanaan Ruang						
1.	Perwujudan IGT Perencanaan Ruang	Mewujudkan IGT Perencanaan Ruang	Peta Recana Tata Ruang Pulau/ Kepulauan skala 1:500.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru.	Kementerian ATR/BPN	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves; 3. Kemendagri; 4. Kementerian LHK; 5. BIG; 6. Pemprov; 7. Pemkab/kota.

2. Perwujudan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
2.	Perwujudan IGT Perencanaan Ruang	Mewujudkan IGT Perencanaan Ruang	Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) skala 1:5.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Juni (B06) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Juni (B06) dan Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru.	Kementerian ATR/BPN	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemendagri; 3. Kementerian LHK; 4. BIG; 5. Pemprov; 6. Pemkab/kota.
3.	Perwujudan IGT Perencanaan Ruang	Mewujudkan IGT Perencanaan Ruang	Peta Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah skala 1:500.000- 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:	Kementerian KP	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves; 3. Kementerian PPN/Bappenas;

a. Kompilasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru.		4. Kemendagri; 5. Kemenlu; 6. Kementerian ATR/BPN; 7. Kementerian ESDM; 8. Kemenhub; 9. Kemenparekraf; 10. Kemenkominfo; 11. Kementerian LHK; 12. Setkab; 13. BIG; 14. Pushidrosal TNI – AL.
4.	Perwujudan IGT Perencanaan Ruang	Mewujudkan IGT Perencanaan Ruang	Peta Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu skala 1:500.000 - 1:5.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021;	Kementerian KP	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves; 3. Kementerian PPN/Bappenas; 4. Kemendagri;

b. Integrasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru.		5. Kemenlu; 6. Kementerian ATR/BPN; 7. Kemenhan; 8. Kementerian ESDM; 9. Kemenhub; 10. Kemenparekraf; 11. Kemenkominfo; 12. Kementerian LHK; 13. Setkab; 14. BIG; 15. Pushidrosal TNI – AL.
5.	Perwujudan IGT Perencanaan Ruang	Perwujudan IGT Perencanaan Ruang	Peta Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional skala 1:500.000 - 1:5.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021;	Kementerian KP	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves; 3. Kementerian PPN/Bappenas; 4. Kemendagri;

b. Integrasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru.		5. Kementerian ATR/BPN; 6. Kementerian ESDM; 7. Kemenhub; 8. Kemenparekraf; 9. Kemenkominfo; 10. Kementerian PUPR; 11. Kementerian LHK; 12. Setkab; 13. BIG; 14. Pushidrosal TNI – AL.

D.3 Perwujudan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
D.3 Perwujudan IGT Potensi						
1.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Neraca Penatagunaan Tanah skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Maret (B03) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ATR/BPN	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kemendagri; 4. Kementerian LHK; 5. Pemprov; 6. Pemkab/kota.
2.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Potensi Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Lahan Sawah yang Dilindungi minimal skala 1: 5.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:	Kementerian ATR/BPN	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian PPN/Bappenas;

a. Kompilasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Maret (B03) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		3. Kemendagri; 4. Kementerian PUPR; 5. Kementan; 6. Kementerian LHK; 7. Kementerian ESDM; 8. Kemenperin; 9. Kemendes PDTT; 10. BIG; 11. Pemprov; 12. Pemkab/kota.
3.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Kawasan Gudang BUMN skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021;	Kementerian BUMN	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kemendagri;

b. Integrasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		4. Kemendag; 5. Kementan; 6. Kemenperin; 7. Kementerian PUPR.
4.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Cekungan Air Tanah minimal skala 1:250.000	IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.	Kementerian ESDM	1. Kemenko Marves; 2. Kemenko Perekonomian; 3. Kementerian PPN/Bappenas; 4. Kemendagri; 5. Kementerian ATR/BPN; 6. Kementerian PUPR; 7. BIG; 8. Pemprov; 9. Pemkab/kota.

5. Perwujudan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
5.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Kerentanan Likui-faksi skala 1:100.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. 3. Target Pemutakhiran cakupan wilayah tahun:	Kementerian ESDM	1. Kemenko Marves; 2. Kemenko Perekonomian; 3. Kemendagri; 4. Kementerian ATR/BPN; 5. Kementerian PUPR; 6. BIG; 7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); 8. Pemprov; 9. Pemkab/kota.

a. 2021 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				a. 2021: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten; b. 2022: Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat; c. 2023: Bengkulu, Jambi, dan Lampung; d. 2024: Sulawesi Tengah dan Gorontalo.		
6.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Patahan Aktif Indonesia skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:	Kementerian ESDM	1. Kemenko Marves; 2. Kemendagri; 3. Kementerian ATR/BPN;

a. Kompilasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Maret (B03) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. 3. Target Pemutakhiran cakupan wilayah tahun: a. 2021: Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera; b. 2022: Kalimantan; c. 2023: Sulawesi; d. 2024: Papua.		4. BIG; 5. BNPB; 6. Pemprov; 7. Pemkab/kota.

7. Perwujudan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
7.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Sebaran Terminal Bahan Bakar Minyak dan Terminal LPG skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ESDM	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves; 3. Kementerian PPN/Bappenas; 4. Kemendagri; 5. Kementerian BUMN; 6. Kemenperin; 7. Kemendag; 8. Kemenhub.
8.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Lokasi Kilang Minyak skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:	Kementerian ESDM	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves;

a. Kompilasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		3. Kementerian PPN/Bappenas; 4. Kemendagri; 5. Kementerian BUMN; 6. Kemenperin; 7. Kemendag; 8. Kemenhub.
9.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Kerentanan Pesisir skala 1:250.000 - 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.	Kementerian KP	1. Kemenko Marves; 2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); 3. LAPAN; 4. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG);

2. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		5. BIG; 6. BNPB; 7. Pushidrosal TNI – AL.
10.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Potensi Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Potensi Perikanan Budidaya skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian KP	1. Kemenko Marves; 2. LIPI; 3. BIG; 4. Pushidrosal TNI – AL.

11. Perwujudan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
11.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian KP	1. Kemenko Marves; 2. Kemenhub; 3. BIG; 4. Pushidrosal TNI – AL; 5. Pemprov.
12.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Potensi Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Potensi Sumber Daya Arkeologi Maritim skala 1:250.000 dan 1:100.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:	Kementerian KP	1. Kemenko Marves; 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud);

a. Kompilasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2012. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		3. LIPI; 4. BIG; 5. Pushidrosal TNI – AL.
13.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Potensi Sumber Daya dan Lingkungan	Peta skala Lahan Garam 1:25.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.	Kementerian KP	1. Kemenko Marves; 2. Kemenko Perekonomian; 3. Kemenperin; 4. Kementerian BUMN; 5. BIG; 6. Badan Pusat Statistik (BPS);

2. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		7. Pemprov; 8. Pemkab/kota.
14.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Fasilitas Sosial Fasilitas Umum (Fasos Fasum) dan Utilitas	Peta Sebaran Lokasi Akses Layanan Keuangan skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Maret (B03) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kemenko Perekonomian	1. Kemenkeu; 2. Kemendag; 3. Kemenkop UKM; 4. Kementerian BUMN; 5. Bank Indonesia (BI); 6. BPS; 7. Otoritas Jasa Keuangan (OJK); 8. Pemkab/kota.
15.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Rawan Erosi skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:	Kementerian LHK	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves;

a. Kompilasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				a. Kompilasi Bulan September (B09) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		3. Kementerian PPN/Bappenas; 4. Kementerian PUPR; 5. Kementerian ATR/BPN; 6. BNPB; 7. BIG.
16.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Lahan Kritis skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan September (B09) 2022; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2022.	Kementerian LHK	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves; 3. Kementerian PPN/Bappenas; 4. Kementerian PUPR; 5. Kementerian ATR/BPN; 6. BNPB; 7. BIG.

2. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		
17.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan skala 1:250.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Desember (B12) 2021; b. Kompilasi dan Integrasi Bulan Maret (B03) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian LHK	1. Kemenko Marves; 2. Kemenko Perekonomian; 3. Kemendagri; 4. Kementerian ATR/BPN; 5. Kementerian ESDM; 6. Kemendes PDTT; 7. Kementan; 8. Kementerian PUPR; 9. BNPB; 10. BIG; 11. LAPAN; 12. Pemprov; 13. Pemkab/kota.

18. Perwujudan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
18.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Mangrove	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian LHK	1. Kemenko Marves; 2. Kemenko Perekonomian; 3. Kemendagri; 4. Kementerian KP; 5. BIG; 6. LAPAN; 7. LIPI; 8. BRGM; 9. Pemprov; 10. Pemkab/kota.
19.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) minimal skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:	Kementerian LHK	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves; 3. Kementerian PPN/Bappenas;

a. Kompilasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2012. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		4. Kementerian ATR/BPN; 5. Kementerian ESDM; 6. Kementerian PUPR; 7. Kementan; 8. BIG; 9. BMKG; 10. LAPAN; 11. Pemprov; 12. Pemkab/kota.
20.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Pemantauan Sampah Laut skala 1:250.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.	Kementerian LHK	1. Kemenko Marves; 2. Kemenko Perekonomian; 3. Kementerian PPN/Bappenas; 4. Kementerian ATR/BPN; 5. Kementerian ESDM;

2. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		6. Kementerian KP; 7. Kementerian PUPR; 8. Kemenhub; 9. BIG; 10. BMKG; 11. LAPAN; 12. LIPI.
21.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Daerah Irigasi Rawa skala 1:5.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Juni (B06) 2021.	Kementerian PUPR	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves; 3. Kementan; 4. Kementerian ATR/BPN; 5. Kementerian LHK; 6. BIG;

2. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun: 3. Target Pemutakhiran cakupan wilayah tahun : a. 2021: Kalimantan dan Sumatera; b. 2022: Papua.		7. LAPAN; 8. Pemprov; 9. Pemkab/kota.
22.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Daerah Irigasi Tambak skala 1:5.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Juni (B06) 2021.	Kementerian PUPR	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves; 3. Kementan; 4. Kementerian ATR/BPN; 5. Kementerian LHK; 6. Kementerian KP; 7. BIG;

2. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. 3. Target Pemutakhiran cakupan wilayah tahun: a. 2021: Jawa, Sulawesi dan Kalimantan; b. 2022: Sumatera.		8. LAPAN; 9. Pemprov; 10. Pemkab/kota.
23.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Neraca Sumber Daya Air skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021;	Kementerian PUPR	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves; 3. Kemendagri; 4. Kementerian LHK; 5. Kementerian ATR/BPN;

b. Integrasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		6. Kementan; 7. Kementerian ESDM; 8. BIG; 9. Pemprov; 10. Pemkab/kota.
24.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Lokasi Danau, Situ dan Embung skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Juni (B06) 2021; 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian PUPR	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves; 3. Kementerian PPN/Bappenas; 4. Kemendagri; 5. Kementerian LHK; 6. Kementan; 7. Kementerian ATR/BPN; 8. BIG; 9. Pemprov; 10. Pemkab/kota.

25. Perwujudan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
25.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Kawasan Permukiman Kumuh skala 1:5.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Juni (B06) 2021; 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian PUPR	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves; 3. Kementerian PPN/Bappenas; 4. Kementerian ATR/BPN; 5. Kemendagri; 6. Kementerian LHK; 7. Kementerian Kesehatan (Kemenkes);
26.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Lokasi Kegiatan Logistik dan Pergudangan skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021;	Kemendag	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemendagri; 3. Kemenperin; 4. Kementerian BUMN; 5. Kemenkop UKM;

b. Integrasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				b. Integrasi Bulan Maret (B03) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		6. BIG; 7. Pemprov; 8. Pemkab/kota.
27.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Sebaran Pasar Rakyat dan Pasar Desa skala 1:50.000 – 1:5.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kemendag	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemendagri; 3. Kemendes PDTT; 4. Kementerian PUPR; 5. Kemenperin; 6. Kementerian BUMN; 7. Kemenkop UKM; 8. BIG; 9. Pemprov; 10. Pemkab/kota;

28. Perwujudan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
28.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Sebaran Pasar Induk, Terminal Agribisnis, Pasar Komoditi dan Pusat Distribusi Regional skala 1:50.000 – 1:5.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kemendag	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemendagri; 3. Kemendes PDTT; 4. Kementerian PUPR; 5. Kemenperin; 6. Kementerian BUMN; 7. Kemenkop UKM; 8. BIG; 9. Pemprov; 10. Pemkab/kota.
29.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Alur Pelayaran Laut skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:	Kemenhub	1. Kemenko Marves; 2. Kemenko Perekonomian; 3. Kementerian KP;

a. Kompilasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		4. BIG; 5. Pushidrosal TNI – AL.
30.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Maret (B03) 2021.	Kemenhub	1. Kemenko Marves; 2. Kementerian KP; 3. BIG; 4. Kemenkominfo; 5. Pushidrosal TNI – AL.

2. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		
31.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Sebaran Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Penyeberangan skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Maret (B03) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kemenhub	1. Kemenko Marves; 2. Kementerian KP; 3. BIG; 4. Kemenkominfo; 5. Pushidrosal TNI – AL; 6. Pemprov; 7. Pemkab/kota.
32.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Ruang Udara skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:	Kemenhub	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves; 3. Kementerian BUMN;

a. Kompilasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Juni (B06) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		4. Kemenhan; 5. TNI-AU;
33.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Potensi Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Cetak Sawah Indonesia skala 1:5.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementan	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemendagri; 3. Kementerian LHK; 4. Kementerian ATR/BPN; 5. BIG; 6. LAPAN; 7. Pemprov; 8. Pemkab/kota.

34. Perwujudan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
34.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Lahan Pertanian Tanaman Pangan skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementan	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian PPN/Bappenas 3. Kemendagri; 4. Kemendag; 5. Kementerian LHK; 6. Kementerian ATR/BPN; 7. BIG; 8. LAPAN; 9. Pemprov; 10. Pemkab/kota.
35.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Lahan Pertanian Hortikultura skala 1: 50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:	Kementan	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemendagri; 3. Kementerian LHK;

a. Kompilasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		4. Kementerian ATR/BPN; 5. BIG; 6. LAPAN; 7. Pemprov; 8. Pemkab/kota.
36.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Lahan Perkebunan skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.	Kementan	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemendagri; 3. Kementerian LHK; 4. Kementerian ATR/BPN; 5. BIG; 6. LAPAN; 7. Pemprov; 8. Pemkab/kota.

2. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		
37.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Lahan Peternakan skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementan	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemendagri; 3. Kementerian LHK; 4. Kementerian ATR/BPN; 5. BIG; 6. LAPAN; 7. Pemprov; 8. Pemkab/kota.

38. Perwujudan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
38.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Rawan Banjir skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	BIG	1. Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kemendagri; 3. Kementerian PUPR; 4. Kementerian LHK; 5. Kementerian ATR/BPN; 6. BIG; 7. BMKG; 8. BNPB 9. LAPAN; 10. Pemprov; 11. Pemkab/kota.
39.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Seismisitas Gempa Bumi skala 1:50.000 - 1:25.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:	BMKG	1. Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kementerian ESDM; 3. Kementerian PUPR;

a. Kompilasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Maret (B03) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		4. BIG; 5. BNPB.
40.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Terumbu Karang skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	LIPI	1. Kemenko Marves; 2. Kementerian KP; 3. Pemprov; 4. Pemkab/kota.

41. Perwujudan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
41.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Sebaran Objek Vital Nasional Skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Maret (B03) 2021; b. Integrasi Bulan Juni (B06) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam); 3. Kemendagri; 4. Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg); 5. Setkab; 6. Kementerian BUMN; 7. Kementerian ESDM; 8. Kemenperin; 9. Kementerian PUPR; 10. Kemenhub;

11. Kemendikbud . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						11. Kemendikbud; 12. Kemenparekraf; 13. Badan Intelijen Negara (BIN); 14. BIG.
E. PEMUTAKHIRAN IGT						
E.1 Pemuktahiran IGT Status						
1.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Pertanahan	Peta Hak Guna Usaha (HGU), minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Juni (B06) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ATR/BPN	1. Kementan; 2. Kementerian BUMN; 3. Kementerian LHK; 4. Kementerian ESDM; 5. Kementerian PUPR; 6. Kemendes PDTT; 7. BIG; 8. Pemprov; 9. Pemkab/kota.

2. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
2.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Pertanahan	Peta Hak Pengelolaan (HPL), minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Juni (B06) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ATR/BPN	1. Kementan; 2. Kementerian BUMN; 3. Kementerian LHK; 4. Kementerian ESDM; 5. Kementerian PUPR; 6. Kemendes PDTT; 7. BIG; 8. Pemprov; 9. Pemkab/kota.
3.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Pertanahan	Peta Hak Guna Bangunan (HGB) minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Juni (B06) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ATR/BPN	1. Kemendagri; 2. Kemenperin; 3. Kementan; 4. Kementerian BUMN; 5. Kementerian LHK; 6. Kementerian ESDM; 7. Kementerian PUPR;

8. Kemendes . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						8. Kemendes PDTT; 9. BIG; 10. Pemprov; 11. Pemkab/kota.
4.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Pertanahan	Peta Hak Ulayat, minimal skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ATR/BPN	1. Kemendagri; 2. Kementerian LHK; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kementerian ESDM; 5. Kementerian PUPR; 6. Kemendes PDTT; 7. BIG; 8. Pemprov; 9. Pemkab/kota.

5. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
5.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Perizinan Lokasi dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Peta Izin Lokasi dan peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ATR/BPN	1. Kemendagri; 2. Kementan; 3. Kemenperin; 4. Kementerian LHK; 5. Kementerian ESDM; 6. Kementerian PUPR; 7. Kemenhub; 8. Kementerian KP; 9. BIG; 10. Pemprov; 11. Pemkab/kota.
6.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Batas Wilayah	Peta Batas Administrasi Provinsi, Peta Batas Administrasi Kabupaten/Kota skala 1:50.000	Seluruh Wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Juni (B06) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kemendagri	1. Kementerian ATR/BPN; 2. Kemenlu; 3. LAPAN; 4. BIG; 5. Direktorat Topografi TNI AD;

6. Pemprov . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						6. Pemprov; 7. Pemkab/kota.
7.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Batas Wilayah	Peta Batas Administrasi Desa/Desa Adat dan Peta Batas Administrasi Kelurahan minimal skala 1:10.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Juni (B06) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun: Desa: 2021: 10 Provinsi 2022: 12 Provinsi 2023: 11 Provinsi Kelurahan: 2021: 5 Provinsi 2022: 13 Provinsi 2023: 15 Provinsi	Kemendagri	1. Kemendes PDTT; 2. Kementerian ATR/BPN; 3. BIG; 4. LAPAN; 5. Kementerian LHK; 6. Kementerian KP; 7. Direktorat Topografi TNI AD; 8. Pemprov; 9. Pemkab/kota.

8. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
8.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus	Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kemendes PDTT	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemendagri; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kementerian LHK; 5. Kementan; 6. Kementerian PUPR; 7. Kemenhub; 8. BIG; 9. LAPAN; 10. Pemprov; 11. Pemkab/kota.
9.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus	Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi Skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kemendes PDTT	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian ATR/BPN; 3. Kementerian LHK; 4. Kementan;

5. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						5. Kementerian PUPR; 6. Kemenhub; 7. BIG; 8. LAPAN; 9. Pemprov; 10. Pemkab/kota.
10.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhiran IGT Migas dan Minerba	Peta Perizinan berusaha di bidang pertambangan skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Maret (B03), Bulan Juni (B06), Bulan September (B09) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ESDM	1. Kemenko Marves; 2. Kemenko Perekonomian; 3. Kemendagri; 4. Kementerian KP; 5. Kementerian LHK; 6. Kementerian ATR/BPN; 7. Kementerian PUPR; 8. Kemenhub;

9. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 10. BIG; 11. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); 12. Pushidrosal TNI - AL; 13. Pemprov; 14. Pemkab/kota.
11.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhiran IGT Migas dan Minerba	Peta Wilayah Kerja Migas skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Maret (B03), Bulan Juni (B06), Bulan September (B09) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ESDM	1. Kemenko Marves; 2. Kemenko Perekonomian; 3. Kementerian PPN/Bappenas; 4. Kemendagri; 5. Kementerian KP; 6. Kementerian LHK;

7. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						7. Kementerian ATR/BPN; 8. Kementerian PUPR; 9. BIG; 10. Pemprov; 11. Pemkab/kota.
12.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus	Peta Penetapan Kawasan Khusus Ekonomi Khusus (KEK), minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Juli (B06) dan Bulan Desember (B12) Setiap ada perubahan/ penetapan baru.	Kemenko Perekonomian	1. Kementerian ATR/BPN; 2. Kemendag; 3. Kemenperin; 4. Kemenparekraf; 5. Kementerian LHK; 6. Kemendagri; 7. BKPM; 8. BIG; 9. Pemprov; 10. Pemkab/kota.

13. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
13.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus	Peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Juli (B06) dan Bulan Desember (B12) Setiap ada perubahan/ penetapan baru.	Kemenko Perekonomian	1. Kemendagri; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kemendag; 4. Kemenhub; 5. Kementerian PUPR; 6. BKPM; 7. BIG; 8. Pemprov; 9. Pemkab/kota.
14.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang	Peta Indikatif Tumpang Tindih antar IGT (PITTI) skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kemenko Perekonomian	1. Kemendagri; 2. Kementerian ATR/BPN; 3. Kementerian LHK; 4. Kementerian ESDM; 5. Kemendes PDTT; 6. Kementan;

7. Kemenperin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						7. Kemenperin; 8. Kementerian KP; 9. BIG; 10. Pemprov; 11. Pemkab/kota.
15.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Batas Wilayah	Peta Batas Darat Negara skala 1:25.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada kesepakatan/ penetapan baru.	Kemenlu	1. Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kemendagri; 3. Kementerian KP; 4. Kementerian ATR/BPN; 5. Kementerian LHK; 6. Kemenhan; 7. Direktorat Topografi TNI AD; 8. LAPAN; 9. Pemprov; 10. Pemkab/kota.

16. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
16.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Batas Wilayah	Peta Batas Laut Negara skala 1:1.000.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada kesepakatan/ penetapan baru.	Kemenlu	1. Kemenhan; 2. Kementerian KP; 3. Kementerian ESDM; 4. Pusidrosal TNI- AL; 5. BIG.
17.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kehutanan	Peta Penetapan Kawasan Hutan pada skala 1:100.000 – 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Maret (B03), Bulan Juni (B06), Bulan September (B09) dan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian LHK	1. Kemendagri; 2. Kementerian LHK; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kementerian PUPR; 5. BIG; 6. Pemprov; 7. Pemkab/kota.

18. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
18.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kehutanan	Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUPHHK-RE), minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Juni (B06) dan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian LHK	1. Kemendagri; 2. Kementerian ATR/BPN; 3. BIG; 4. Pemprov.
19.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kehutanan	Peta Hutan Tanaman Rakyat (HTR), minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun.	Kementerian LHK	1. Kemendagri; 2. Kementerian ATR/BPN; 3. Kementan; 4. Kemendes PDTT; 5. BIG; 6. Pemprov; 7. Pemkab/kota.

20. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
20.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kehutanan	Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, minimal pada sakala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun.	Kementerian LHK	1. Kemendagri; 2. Kementerian ATR/BPN; 3. BIG; 4. Pemprov; 5. Pemkab/kota.
21.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kehutanan	Peta Hutan Adat, Minimal pada skala 1 : 50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun.	Kementerian LHK	1. Kemendagri; 2. Kementerian ATR/BPN; 3. Kementan; 4. Kementerian LHK; 5. Kementerian ESDM; 6. Kemendikbud; 7. BIG; 8. Pemprov; 9. Pemkab/kota.

22. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
22.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kehutanan	Peta Penunjukkan Kawasan Hutan skala 1:250.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Desember (B12) setiap tahun atau setiap ada penetapan baru.	Kementerian LHK	1. Kemendagri; 2. Kementerian KP; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kementerian PUPR; 5. Kementan; 6. Kemendes PDTT; 7. BIG; 8. Pemprov; 9. Pemkab/kota.
23.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kehutanan	Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Juni (B06) dan Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru.	Kementerian LHK	1. Kemenko Marves; 2. Kemenko Perekonomian; 3. Kemendagri; 4. Kementerian ATR/BPN; 5. Kemendes PDTT; 6. Setkab; 7. BIG; 8. Pemprov; 9. Pemkab/kota.

24. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
24.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus	Peta Kawasan Industri Eksisting dan Peta Rencana Kawasan Industri skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kemenperin	1. Kemendagri; 2. Kementan; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kementerian LHK; 5. BIG; 6. Pemprov; 7. Pemkab/kota.
25.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus	Peta Kawasan Cagar Budaya skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kemendikbud	1. Kemendagri; 2. Kemenparekraf; 3. Kemenhan; 4. Kemenperin; 5. Kementerian ATR/BPN; 6. Kementerian PUPR; 7. Kementerian LHK; 8. Kementerian ESDM; 9. Kementan; 10. Kementerian KP; 11. Pemprov; 12. Pemkab/kota.

26. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
26.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus	Peta Sebaran Lokasi Cagar Budaya skala 1: 50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kemendikbud	1. Kemendagri; 2. Kemenparekraf; 3. Kemenhan; 4. Kemenperin; 5. Kementerian ATR/BPN; 6. Kementerian PUPR; 7. Kementerian LHK; 8. Kementerian ESDM; 9. Kementan; 10. Kementerian KP; 11. Pemprov; 12. Pemkab/kota.
E.2 Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang						
1.	Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang	Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang	Peta RTRW Nasional (RTRWN) skala 1:1.000.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran setiap ada perubahan/ penetapan baru.	Kementerian ATR/BPN	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kemendagri;

4. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						4. Kementerian LHK; 5. Kementerian KP; 6. Kementerian PUPR; 7. Kemenhub; 8. Kementerian ESDM; 9. Kementan; 10. BIG; 11. LAPAN; 12. Pemprov.
2.	Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang	Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang	Peta RTRW Provinsi skala 1:250.000	Seluruh Wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Juni (B06) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ATR/BPN	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemendagri; 3. Kementerian LHK; 4. Kementerian KP; 5. Kementerian PUPR; 6. Kemenhub; 7. Kementerian ESDM; 8. Kementan;

8. BIG . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						9. BIG; 10. LAPAN; 11. Pemprov; 12. Pemkab/kota.
3.	Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang	Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang	Peta RTRW Kabupaten skala 1:50.000 dan RTRW Kota skala 1:25.000	Seluruh Wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Juni (B06) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ATR/BPN	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemendagri; 3. Kementerian LHK; 4. Kementerian KP; 5. Kementerian PUPR; 6. Kemenhub; 7. Kementerian ESDM; 8. Kementan; 9. BIG; 10. LAPAN; 11. Pemprov; 12. Pemkab/kota.

4. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
4.	Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang	Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang	Peta RTR KSN 1:250.000 – 1:5.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ATR/BPN	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kemendagri; 4. Kementerian LHK; 5. Kementerian KP; 6. Kementerian PUPR; 7. Kemenhub; 8. Kementerian ESDM; 9. Kementan; 10. BIG; 11. LAPAN; 12. Pemprov; 13. Pemkab/kota.

5. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
5.	Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang	Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang	Peta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional skala 1:250.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) 2020 setiap 5 tahun (setiap ada perubahan/ penetapan baru).	Kementerian PPN/Bappenas	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian ATR/BPN; 3. Kementerian LHK; 4. Kementan; 5. Kemenhub; 6. Kementerian ESDM; 7. Kementerian PUPR; 8. Kemenparekraf; 9. Kemenperin; 10. Kementerian KP; 11. Kemenkes; 12. Kemendikbud; 13. BIG; 14. Pemprov; 15. Pemkab/kota.

6. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
6.	Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang	Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang	Peta RKP skala 1:250.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian PPN/Bappenas	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian ATR/BPN; 3. Kementerian LHK; 4. Kementan; 5. Kemenhub; 6. Kementerian ESDM; 7. Kementerian PUPR; 8. Kemenparekraf; 9. Kemenperin; 10. Kementerian KP; 11. Kemenkes; 12. Kemendikbud; 13. BIG; 14. Pemprov; 15. Pemkab/kota.

7. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
7.	Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang	Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang	Peta Kawasan Wilayah Pertahanan Negara skala 1:1.000.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran setiap ada perubahan/ penetapan baru.	Kemenhan	1. Kemendagri; 2. Kementerian ATR/BPN; 3. Kementerian LHK; 4. Kementerian KP; 5. LAPAN; 6. BIG; 7. Pemprov; 8. Pemkab/kota.
8.	Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang	Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang	Peta Rinci Wilayah Pertahanan Negara skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kemenhan	1. Kemenko Polhukam; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kemendagri; 4. Kementerian ATR/BPN; 5. Kementerian LHK; 6. Kementerian KP; 7. LAPAN;

8. BIG . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						8. BIG; 9. Pemprov; 10. Pemkab/kota.
9.	Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang	Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang	Peta Rencana Tata Ruang Laut skala 1:1.000.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Setiap ada perubahan/ penetapan baru.	Kementerian KP	1. Kemenko Marves; 2. Kemenko Perekonomian; 3. Kementerian PPN/Bappenas; 4. Kemendagri; 5. Kemenlu; 6. Kementerian ATR/BPN; 7. Kemenhan; 8. Kementerian ESDM; 9. Kemenhub;

10. Kemenparekraf . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						10. Kemenparekraf; 11. Kemenkominfo; 12. Kementerian PUPR; 13. Kementerian LHK; 14. BIG; 15. Pushidrosal TNI - AL.
10.	Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang	Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang	Peta RZWP3K Provinsi skala 1:250.000	Seluruh Wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Juni (B06) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian KP	1. Kemenko Marves; 2. Kemenko Perekonomian; 3. Kementerian PPN/Bappenas; 4. Kemendagri; 5. Kementerian ATR/BPN; 6. Kemenhan;

7. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						7. Kementerian ESDM; 8. Kemenhub; 9. Kemenparekraf; 10. Kemenkominfo; 11. Kementerian LHK; 12. BIG; 13. Pushidrosal TNI - AL; 14. Pemprov; 15. Pemkab/kota.
11.	Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang	Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang	Peta Bagian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) skala 1:50.000	Seluruh Wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Juni (B06) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian KP	1. Kemenko Marves; 2. Kemenko Perekonomian; 3. Kementerian PPN/Bappenas; 4. Kemendagri; 5. Kementerian ATR/BPN; 6. Kemenhan;

7. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						7. Kementerian ESDM; 8. Kemenhub; 9. Kemenparekraf; 10. Kemenkominfo; 11. Kementerian LHK; 12. BIG; 13. Pushidrosal TNI - AL; 14. Pemprov; 15. Pemkab/kota.
E.3 Pemutakhiran IGT Potensi						
1.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Penggunaan Tanah minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ATR/BPN	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementan; 3. Kementerian LHK; 4. Kementerian ESDM;

5. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						5. Kementerian KP; 6. BIG; 7. LAPAN; 8. Pemprov.
2.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Lahan Baku Sawah Nasional skala minimal 1: 50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ATR/BPN	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian LHK; 3. Kementerian PUPR; 4. Kementan; 5. BIG; 6. LAPAN.
3.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Infrastruktur Pipa Gas Bumi skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ESDM	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemendagri; 3. Kemenperin; 4. Kementerian KP;

5. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						5. Kementerian ATR/BPN; 6. Kementerian PUPR; 7. Kementerian BUMN; 8. Kemenhub; 9. Pemprov.
4.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Jaringan Listrik skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ESDM	1. Kemenko Marves; 2. Kemenko Perekonomian; 3. Kementerian PPN/Bappenas; 4. Kemendagri; 5. Kementerian BUMN; 6. Kementerian KP; 7. Kementerian LHK; 8. Kementerian ATR/BPN;

9. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						9. Kementerian PUPR; 10. Kemenperin; 11. BIG; 12. Pemprov; 13. Pemkab/kota.
5.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Sebaran Gardu Listrik skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ESDM	1. Kemenko Marves; 2. Kemenko Perekonomian; 3. Kementerian PPN/Bappenas; 4. Kemendagri; 5. Kementerian BUMN; 6. Kementerian KP; 7. Kementerian LHK; 8. Kementerian ATR/BPN;

9. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 100 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						9. Kementerian PUPR; 10. Kemenperin; 11. BIG; 12. Pemprov; 13. Pemkab/kota.
6.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Sebaran Pembangkit Listrik skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ESDM	1. Kemenko Marves; 2. Kemenko Perekonomian; 3. Kementerian PPN/Bappenas; 4. Kemendagri; 5. Kementerian BUMN; 6. Kementerian KP; 7. Kementerian LHK; 8. Kementerian ATR/BPN; 9. Kementerian PUPR; 10. Kemenperin;

11. BIG . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						11. BIG; 12. Pemprov; 13. Pemkab/kota.
7.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Lokasi Pembangkit Listrik skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ESDM	1. Kemenko Marves; 2. Kemenko Perekonomian; 3. Kementerian PPN/Bappenas; 4. Kemendagri; 5. Kementerian BUMN; 6. Kementerian KP; 7. Kementerian LHK; 8. Kementerian ATR/BPN; 9. Kementerian PUPR; 10. Kemenperin; 11. BIG; 12. Pemprov; 13. Pemkab/kota.

8. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
8.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Geologi skala 1:100.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan baru.	Kementerian ESDM	1. Kemenko Marves; 2. Kemendagri; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kementerian PUPR; 5. BIG; 6. LAPAN; 7. BNPB; 8. Pemprov; 9. Pemkab/kota.
9.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Hidrogeologi skala 1:100.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan baru.	Kementerian ESDM	1. Kemenko Marves; 2. Kemendagri; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kementerian PUPR; 5. BIG; 6. LAPAN; 7. BNPB; 8. Pemprov; 9. Pemkab/kota.

10. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
10.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Kebencanaan	Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ESDM	1. Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kemendagri; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kementerian PUPR; 5. Kemenhub; 6. BIG; 7. BNPB; 8. Pemprov; 9. Pemkab/kota.
11.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Kebencanaan	Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ESDM	1. Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kemendagri; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kementerian PUPR; 5. Kemenhub; 6. BIG;

7. BNPB . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						7. BNPB; 8. Pemprov; 9. Pemkab/kota.
12.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Kebencanaan	Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ESDM	1. Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kementerian ATR/BPN; 3. Kementerian PUPR; 4. Kemenhub; 5. Kementerian LHK; 6. BIG; 7. BNPB; 8. Pemprov; 9. Pemkab/kota.

13. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
13.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Kebencanaan	Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ESDM	1. Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kemendagri; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kementerian KP; 5. Kementerian PUPR; 6. Kemenhub; 7. BIG; 8. BNPB; 9. Pemprov; 10. Pemkab/kota.
14.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya Lingkungan	Peta Kawasan Bentang Alam Karst skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian ESDM	1. Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kementerian ATR/BPN; 3. Kementerian LHK; 4. Kementerian PUPR; 5. BIG;

6. Pemprov . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						6. Pemprov; 7. Pemkab/kota.
15.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Migas dan Minerba	Peta Sumber Daya Mineral Skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Juni (B06) setiap tahun.	Kementerian ESDM	1. Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kementerian ATR/BPN; 3. Kementerian PUPR; 4. Kemenperin; 5. Kementerian LHK; 6. BIG; 7. Badan Tenaga Nuklir Nasional; 8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN); 9. Pemprov; 10. Pemkab/kota.

16. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
16.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Migas dan Minerba	Peta Sumber Daya Batubara skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Juni (B06) setiap tahun.	Kementerian ESDM	1. Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kemenkeu; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kementerian PUPR; 5. Kemenperin; 6. Kementerian LHK; 7. BIG; 8. Pemprov; 9. Pemkab/kota.
17.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Migas dan Minerba	Peta Sumber Daya Panas Bumi skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Juni (B06) setiap tahun.	Kementerian ESDM	1. Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kementerian ATR/BPN; 3. Kementerian PUPR; 4. Kemenperin;

5. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						5. Kementerian LHK; 6. BIG; 7. Pemprov; 8. Pemkab/kota.
18.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Jaringan Serat Optik skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kemenkominfo	1. Kementerian KP; 2. Kemenhub; 3. Badan Keamanan Laut; 4. Pushidrosal TNI - AL.
19.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Potensi Wilayah Penangkapan Ikan skala 1:250.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun.	Kementerian KP	1. Kemenko Marves; 2. LIPI; 3. LAPAN; 4. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); 5. BIG; 6. Pemprov.

20. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
20.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) skala 1:250.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun.	Kementerian KP	1. Kemenko Marves; 2. LIPI; 3. LAPAN; 4. BPPT; 5. BIG; 6. Pemprov.
21.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Lokasi Pelabuhan Perikanan skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada penetapan baru.	Kementerian KP	1. Kemenko Marves; 2. Kemenhub; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kementerian LHK; 5. BIG; 6. Pemprov; 7. Pemkab/kota.

22. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
22.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada penetapan baru.	Kementerian KP	1. Kemenko Marves; 2. Kemendagri; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kementerian LHK; 5. Kementan; 6. BIG; 7. Pemprov; 8. Pemkab/kota.
23.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Kehutanan	Peta Neraca Sumber Daya Hutan skala 1:250.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian LHK	1. Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kementerian ATR/BPN; 3. BIG; 4. LAPAN; 5. Pemprov.

24. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
24.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Lingkungan	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) skala 1:50.000 (Klasifikasi DAS)	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Juni (B06) dan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian LHK	1. Kemendagri; 2. Kementerian ATR/BPN; 3. Kementerian PUPR; 4. Kementan; 5. BIG; 6. LAPAN; 7. Pemprov; 8. Pemkab/kota.
25.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Lingkungan	Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun: 2021: 30 Kawasan TWA 2022: 50 Kawasan TWA 2023: 50 Kawasan TWA	Kementerian LHK	1. Kemendagri; 2. Kementerian KP; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kemenparekraf; 5. BIG; 6. LAPAN; 7. Pemprov; 8. Pemkab/kota.

26. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
26.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Sebaran Lokasi Pengaman Pantai skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian PUPR	1. Kemenko Marves; 2. Kementerian KP; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kementerian LHK; 5. BIG; 6. LAPAN; 7. Pemprov; 8. Pemkab/kota.
27.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Sebaran Lokasi Rusunawa skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian PUPR	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian ATR/BPN; 3. BIG; 4. Pemprov; 5. Pemkab/kota.

28. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
28.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Jalan Nasional Tol dan Jalan Nasional Non Tol, dan Peta Jalan Provinsi Peta Jalan Kabupaten/Kota skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian PUPR	1. Kementerian/ Lembaga terkait; 2. Pemprov; 3. Pemkab/kota.
29.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Sebaran Lokasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian PUPR	1. Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kementerian KP; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kementerian ESDM; 5. Kemenkes; 6. BIG; 7. LAPAN; 8. Pemprov; 9. Pemkab/kota.

30. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
30.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Sebaran Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Peta Lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian PUPR	1. Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kementerian LHK; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Pemprov; 5. Pemkab/kota.
31.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Sebaran Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian PUPR	1. Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kementerian LHK; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Pemprov; 5. Pemkab/kota.

32. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
32.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Lingkungan	Peta Air Tanah skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian PUPR	1. Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kementerian LHK; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kementerian ESDM; 5. Kementan; 6. BIG; 7. BPS; 8. LAPAN; 9. Pemprov; 10. Pemkab/kota.
33.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Daerah Irigasi Permukaan skala 1:5.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian PUPR	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementan; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kementerian LHK; 5. Kementerian ESDM;

6. BIG . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						6. BIG; 7. LAPAN; 8. Pemprov; 9. Pemkab/kota.
34.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Sebaran Lokasi Bendungan Eksisting dan Peta Sebaran Lokasi Bendungan Rencana skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun: 2021: 4 bendungan 2022: 6 bendungan 2023: 5 bendungan 2024: 5 bendungan	Kementerian PUPR	1. Kementan; 2. Kementerian ATR/BPN; 3. Kementerian LHK; 4. Kementerian ESDM; 5. BNPB; 6. Pemprov; 7. Pemkab/kota.

35. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
35.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Sebaran Lokasi Sabo DAM skala 1: 50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada pembangunan baru.	Kementerian PUPR	1. Kementerian LHK; 2. Kementerian ESDM; 3. BNPB; 4. Pemprov; 5. Pemkab/kota.
36.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Ketersediaan Air skala 1:250.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap 10 tahun.	Kementerian PUPR	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kementan; 4. Kementerian LHK; 5. Kementerian ATR/BPN; 6. Kementerian ESDM; 7. BIG; 8. Pemprov; 9. Pemkab/kota

37. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
37.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Sebaran Pelabuhan Umum skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun.	Kemenhub	1. Kementerian LHK; 2. Kementerian KP; 3. Kemendagri; 4. Kementerian ESDM; 5. Kemenperin; 6. BIG; 7. Pemprov; 8. Pemkab/kota.
38.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Sebaran Pelabuhan Penyeberangan skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun.	Kemenhub	1. Kementerian LHK; 2. Kementerian KP; 3. Kemendagri; 4. Kementerian ESDM; 5. Kemenperin; 6. BIG; 7. Pemprov; 8. Pemkab/kota.

39. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
39.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Sebaran Terminal Khusus skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun.	Kemenhub	1. Kemenko Marves; 2. Kementerian LHK; 3. Kementerian KP; 4. Kementerian ESDM; 5. Kemenperin; 6. BIG; 7. Pemprov; 8. Pemkab/kota.
40.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Sebaran Bandara skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Juni (B06) dan Bulan Desember (B12) Setiap tahun.	Kemenhub	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian PPN/ Bappenas; 3. Kementerian BUMN; 4. Kementerian PUPR; 5. BIG; 6. LAPAN;

7. Pemprov . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						7. Pemprov; 8. Pemkab/kota.
41.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Sebaran Jaringan Rel dan Stasiun Kereta Api skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Juni (B06) dan Bulan Desember (B12) Setiap tahun.	Kemenhub	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kementerian BUMN; 4. Kementerian PUPR; 5. BIG; 6. LAPAN; 7. Pemprov; 8. Pemkab/kota.
42.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Lahan Gambut skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementan	1. Kementerian LHK; 2. Kementerian ATR/BPN; 3. Kementerian PUPR;

4. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						4. Kementerian ESDM; 5. BIG; 6. LAPAN; 7. BRGM.
43.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Tanah Semi- Detail skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementan	1. Kementerian LHK; 2. Kementerian PUPR; 3. Kementerian ESDM; 4. Kementerian ATR/BPN; 5. BIG; 6. LAPAN.
44.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Tutupan Kelapa Sawit Indonesia minimal skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementan	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian LHK; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. BIG; 5. LAPAN; 6. Pemprov; 7. Pemkab/kota.

45. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
45.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Sistem Lahan (Morfologi) dan Peta Morfometri Bentang Lahan skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun.	BIG	1. Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kementan; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kementerian LHK; 5. BIG; 6. LAPAN.
46.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Penutup Lahan skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun.	BIG	1. Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kementan; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kementerian LHK; 5. Kementerian PUPR; 6. LAPAN.

47. Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
47.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Potensi Desa (Sosial-Ekonomi), minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada sensus baru.	BPS	1. Kementerian/Lembaga terkait; 2. Pemprov; 3. Pemkab/kota.
48.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Curah Hujan dan Hari Hujan skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Juni (B06) dan Bulan Desember (B12) Setiap tahun.	BMKG	1. Kementerian PPN/ Bappenas; 2. Kementan; 3. Kementerian PUPR; 4. BIG; 5. LAPAN.
49.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Potensi Energi Matahari dan Angin skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Juni (B06) dan Bulan Desember (B12) Setiap tahun.	BMKG	1. Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kementan; 3. Kementerian PUPR; 4. Kementerian ESDM; 5. BIG; 6. LAPAN.

F. INFRASTRUKTUR . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
F. INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL						
1.	Penyebarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP	Sosialisasi Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI)	Bulan Maret (B03) 2021	BIG	1. Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kemendagri; 3. Kemenkominfo; 4. Badan Standardisasi Nasional (BSN); 5. Pemprov.
2.	Penyebarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP	Sosialisasi Spesifikasi Produk Data, Metadata dan Informasi Kualitas IG	Bulan Maret (B03) 2021	BIG	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kemendagri; 4. Kantor Staf Presiden; 5. Setkab; 6. Pemprov; 7. Pemkab/kota.

3. Penyebarluasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
3.	Penyebarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP	Tersediannya Katalog IG akses terbatas maupun publik dalam Geoportal KSP (Penghubung Simpul Jaringan)	Bulan Maret (B03) 2021	BIG	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kemendagri; 4. Pemprov; 5. Pemkab/kota.
4.	Penyebarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP	Ketersediaan Katalog IGD untuk Mendukung KSP dalam Geoportal Simpul Jaringan BIG berbasis <i>Geospatial Open Linked Data</i> (GOLD)	Bulan Maret (B03) 2021	BIG	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kemendagri; 4. Setkab; 5. Pemprov; 6. Pemkab/kota.

5. Penyebarluasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
5.	Penyebarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP	Tersediannya standar berbagi data melalui <i>Geospatial Open Linked Data</i> (GOLD)	Bulan Juni (B06) 2021	BIG	1. Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kemendagri; 3. Pemprov; 4. Pemkab/kota.
6.	Penyebarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP	Tersedianya Katalog berbagi data di Geoportal KSP (Penghubung Simpul Jaringan) melalui <i>Geospatial Open Linked Data</i> (GOLD)	Bulan Desember (B12) 2021	BIG	1. Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kemendagri; 3. Pemprov; 4. Pemkab/kota.

7. Penyebarluasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
7.	Penyebarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP	Tersedianya skema integrasi sistem JIGN dan sistem pengambilan keputusan (<i>decision support system</i>)	Bulan Maret (B03) 2021	BIG	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kemendagri; 4. Pemprov; 5. Pemkab/kota.
8.	Penyebarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP	Sosialisasi skema integrasi sistem JIGN dan sistem pengambilan keputusan (<i>decision support system</i>)	Bulan Juni (B06) 2021	BIG	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kemendagri; 4. Kemenkominfo; 5. Pemprov; 6. Pemkab/kota.

9. Penyebarluasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
9.	Penyebarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP	Penyiapan integrasi sistem JIGN dan sistem pengambilan keputusan (<i>decision support system</i>)	Bulan September (B09) 2021	BIG	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kemendagri; 4. Kemenkominfo; 5. Pemprov; 6. Pemkab/kota.
10.	Penyebarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP	Tersedianya fungsi geoportal KSP (Penghubung simpul Jaringan) sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan (<i>decision support system</i>)	Bulan Desember (B12) 2022	BIG	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kemendagri; 4. Kemenkominfo; 5. Pemprov; 6. Pemkab/kota.

11. Penyebarluasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
11.	Penyerbarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal KSP	Tersedianya IGT melalui skema <i>content delivery network</i> (CDN) dalam pusat data terdistribusi	Bulan Desember (B12) 2021	BIG	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kemendagri; 4. Kemenkominfo; 5. Pemprov; 6. Pemkab/kota.
12.	Penyerbarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal KSP	Tersedianya IGT melalui skema <i>Content delivery Network</i> (CDN) dalam pusat data terdistribusi 1 lokasi	Bulan Desember (B12) 2021	BIG	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kemendagri; 4. Kemenkominfo; 5. Pemprov; 6. Pemkab/kota.

13. Penyebarluasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
13.	Penyebarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP	Tersedianya IGT KSP melalui replica <i>content network</i> (CDN) dalam pusat data terdistribusi 2 lokasi	Bulan Desember (B12) 2023	BIG	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kemendagri; 4. Kemenkominfo; 5. Pemprov; 6. Pemkab/kota.
14.	Penyebarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP	Tersedianya IGT KSP melalui replica <i>conten network</i> (CDN) dalam pusat data terdistribusi 3 lokasi	Bulan Desember (B12) 2024	BIG	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kemendagri; 4. Kemenkominfo; 5. Pemprov; 6. Pemkab/kota

15. Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
15.	Penyusunan <i>Grand Design</i> Pembangunan Pusat Data Nasional	Penyusunan <i>Grand Design</i> Produk PKSP dalam Pusat Data Nasional	Dokumen Kajian <i>Grand Design</i> Produk PKSP dalam Pusat Data Nasional	Bulan Desember (B12) 2021	Kemenko Perekonomian	1. Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kemenkominfo; 3. Kemenkeu; 4. Kemendagri; 5. Kementerian ATR/BPN; 6. Kementerian LHK; 7. Kementerian ESDM; 8. Kantor Staf Presiden; 9. Setkab; 10. BIG; 11. Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).

G. SINKRONISASI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
G. SINKRONISASI IGT						
1.	Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan	Identifikasi Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan	Penetapan Peta Indikatif Tumpang Tindih antar IGT (PITTI)	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun	Kemenko Perekonomian	1. Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kemendagri; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kementerian LHK; 5. Kementerian ESDM; 6. Kemendes PDTT; 7. Kementan; 8. Kemenperin; 9. Kementerian KP;

10. BIG . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						10. BIG; 11. Pemprov; 12. Pemkab/kota.
		Analisis Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan	Rekomendasi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan	Seluruh wilayah Indonesia Bulan Desember (B12) setiap tahun Tahun 2021:10 Provinsi Tahun 2022:14 Provinsi Tahun 2023:10 Provinsi	Kemenko Perekonomian	1. Kementerian PPN/Bappenas; 2. Kemendagri; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kementerian LHK; 5. Kementerian ESDM; 6. Kemendes PDTT; 7. Kementan; 8. Kemenperin;

9. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						9. Kementerian KP; 10. BIG; 11. Pemprov; 12. Pemkab/kota.
		Pelaksanaan Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan	Rencana Aksi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan	Seluruh wilayah Indonesia Bulan Desember (B12) setiap tahun Tahun 2021:10 Provinsi Tahun 2022:14 Provinsi Tahun 2023:10 Provinsi	Kemenko Perekonomian	1. Kementerian PPN/Bappenas 2. Kemendagri; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kementerian LHK; 5. Kementerian ESDM; 6. Kemendes PDTT; 7. Kementan;

8. Kemenperin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						8. Kemenperin; 9. Kementerian KP; 10. BIG; 11. Pemprov; 12. Pemkab/kota.
2.	Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Kepada Presiden RI	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta	Laporan Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP)	Bulan Juni (B06) 2021; Bulan Desember (B12) 2021; Bulan Juni (B06) 2022; Bulan Desember (B12) 2022;	Kemenko Perekonomian	1. Kemenko Marves; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kantor Staf Presiden; 4. Setkab; 5. BIG.

Bulan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				Bulan Juni (B06) 2023; Bulan Desember (B12) 2023; Bulan Juni (B06) 2024; Bulan Desember (B12) 2024.		

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Departemen Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yulia Silvanna Djaman

SK No 054829 C